

FISIP 02/2013

LAPORAN PENELITIAN
KRITERIA KEADILAN DALAM PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus di Kabupaten Sleman Tahun 2003-2005)



Oleh
ANE PERMATASARI, SIP.

Sumber Biaya: Program Hibah Kompetisi A3

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2006

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : KRITERIA KEADILAN DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kabupaten Sleman tahun 2003-2005)
2. Jenis Penelitian : Penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah dalam masyarakat.
3. Bidang Ilmu : Politik
4. Peneliti
 - a. Nama : Ane Permatasari, SIP.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIK : 163 037
 - d. Pangkat/Gol. : Asisten Ahli/IIIB
 - e. Jabatan : Dosen
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Sleman, Propinsi DIY
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah)

Yogyakarta, 16 Oktober 2006

Peneliti

Mengetahui/Menyetujui

Dekan Fisipol UMY



Bambang Eka Cahya Widada, SIP Msi

Ane Permatasari, SIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkah, karunia, dan kemudahannya maka penelitian KRITERIA KEADILAN DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kabupaten Sleman Tahun 2003-2005) dapat selesai pada waktunya.

Kasus pengusuran terhadap PKL sebagai sebuah kebijakan, sesungguhnya malawan akal sehat dari dua sisi sekaligus. *Pertama*, kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi kaum penganggur, mestinya dipandang sebagai kelalaian pemerintah yang absolut. Pada titik ini, setiap inisiatif kaum penganggur untuk membuka kesempatan kerja bagi dirinya sendiri harus dimaknai sebagai “subsidi tugas” kepada negara, sehingga tidak ada legitimasi etis bagi pemerintah untuk menggusurnya. *Kedua*, pada saat pemerintah tidak mampu menciptakan kebijakan kuratif dalam wujud jaminan sosial (*social security*) bagi kaum penganggur, misalnya tunjangan pendapatan minimal, maka pemerintah sebenarnya kehilangan keabsahan untuk menolak setiap inisiatif kegiatan ekonomi masyarakat (kaum penganggur).

Dengan demikian kebijakan terhadap PKL memiliki dilematis yang tidak sederhana. Kebijakan tersebut sarat dengan berbagai kepentingan dan pihak yang terlibat, baik secara politis, sosial, ekonomi, etika, maupun fisik. Oleh karena itu kebijakan yang berkeadilan dalam pengelolaan PKL diperlukan sebagai solusi yang bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mencari kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini: UMY, para stakeholders, para anggota tim peneliti, para dosen Fisipol UMY serta suami dan anak-anak yang telah membantu dan mendukung.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Perumusan Masalah	6
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	19
E. Kontribusi Penelitian	20
F. Metode Penelitian	20
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI	24
A. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman	24
B. Kondisi Pemerintahan dan Kependudukan	25
C. Kondisi Perekonomian	27
D. Kondisi PKL di Lokasi Penelitian	28
BAB III ANALISIS STUDI	30
A. Faktor Keteraturan Pemanfaatan Fasilitas Publik	31
B. Faktor Tidak Terganggunya Lalu Lintas	33
C. Faktor Estetika Lingkungan	35
D. Faktor Pemberdayaan PKL	37
E. Faktor Penerimaan Pihak di Luar PKL Terhadap PKL	40
F. Faktor Substansi Peraturan	43
G. Pemenuhan Kriteria Keadilan Hasil Analisis Studi Terhadap Kriteria Keadilan Berdasarkan Kajian Teoritis dan Empirik	47
BAB IV KESIMPULAN	51
A. Temuan Studi	54
B. Implikasi Kriteria Keadilan Terhadap <i>Stakeholders</i>	54
C. Kesimpulan	56
D. Saran	57

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Persentase angkatan kerja yang bekerja menurut status pekerjaan di perkotaan tahun 1990 dan 2000	3
Tabel I.2.	Dampak Keberadaan PKL di Perkotaan	16
Tabel III.1.	Pembagian Lokasi Penelitian	30
Tabel III.2.	Interpretasi terhadap persepsi responden tentang kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL	46
Tabel III.3.	Perbandingan kriteria hasil analisis dan teoritis	48